



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KELAUTAN & PERIKANAN

**KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2024**



LAWORO, APRIL 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Renja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 ini dapat diselesaikan, sebagai pedoman yang memandu gerak langkah Dinas Kelautan dan Perikanan dalam berkontribusi mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026.

Sesungguhnya Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak hal yang mungkin belum tercakup dalam dokumen ini. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan kritik yang dinamis dan konstruktif dari berbagai pihak, untuk perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renja SKPD ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Harapan kami semoga kita sama-sama menyatukan gerak langkah untuk perwujudan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lebih baik dan professional.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU	8
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU	8
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	13
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	19
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	30
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	30
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD	32
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN	32
BAB IV PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

<i>No</i>	<i>Teks</i>	<i>Nomor</i>
Tabel T-C 29	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD dan Pencapaiannya sampai dengan Tahun 2022	10
Tabel T-C. C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat	12
Tabel 2.2.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat	14
Tabel T-C 31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Muna Barat	20
Tabel T-C 32.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan pada MUSRENBANG Tingkat Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Muna Barat	28
Tabel T-C 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	33

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Sistematika Penulisan

1.1. LATAR BELAKANG

Kebijakan Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2024, akan disinergiskan dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak terlepas dari **Rancangan Teknokratis RPJMN 2022-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024**.

Berdasarkan hal tersebut, pembangunan sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kondisi fisik dan biologis lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil juga tidak kalah pentingnya pertimbangan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Secara fisik Kabupaten Muna Barat merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi perairan laut seluas sekitar 1.456,87 km² memiliki 34 buah pulau kecil 12 diantaranya adalah merupakan desa - desa pulau. Pulau-pulau tersebut di kelilingi oleh laut dengan panjang garis pantai 192,03 km dan luas daratan pulau-pulainya 4.410,298 ha. Berdasarkan kondisi tersebut maka salah satu arah kebijakan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat lebih diarahkan pada pengembangan budidaya perikanan, baik budidaya laut budidaya air payau maupun kegiatan budidaya air tawar, pengembangan perikanan tangkap yang berwawasan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penataan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terintegrasi serta perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan.

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bidang kelautan dan perikanan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan.

Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun.
2. Menciptakan kepastian pengambilan kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat, hal ini sejalan dengan pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten dan kota merupakan bagian dari provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.

MUSRENBANG berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi dan sinergitas sasaran, arah

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

kebijakan program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Muna Barat.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan Rencana Strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat sebagai Dinas yang menangani urusan bidang kelautan dan perikanan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD mengacu pada tata cara dan tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja (RENJA) bidang kelautan dan perikanan dengan maksud menyediakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2024.

Rencana Kerja (RENJA) bidang Kelautan dan Perikanan sebagai Penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muna Barat merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata, perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang kelautan dan perikanan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2024, dengan memperhatikan hasil musrenbang kecamatan dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Muna Barat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau – Pulau Kecil;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal (SPM);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

26. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat dimaksudkan untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh SKPD dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2024 dengan harapan dapat mendorong partisipasi bagi seluruh *stakeholder* sektor kelautan dan perikanan. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat adalah :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai penjabaran operasional Rencana Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat pada Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat *stakeholder* sektor kelautan dan perikanan dalam menentukan arah dan acuan pelaksanaan kerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2024.
3. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaiannya
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2022 serta isu-isu strategis yang perlu direspon pada tahun 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Sebagaimana Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2022 yaitu meliputi 3 (tiga) hal yaitu : kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok yaitu :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
5. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;

6. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable devolpment*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, masalah-masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Realisasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada setiap program dan kegiatan Tahun 2022 secara umum adalah memenuhi target dan juga melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini tercapai karena pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh setiap ASN Dinas Kelautan dan Perikanan dan juga selalu menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan beberapa SKPD terkait dan juga dengan masyarakat dan stake holder lainnya.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan melalui peraturan bupati, dinas kelautan dan perikanan serta capaiannya tahun anggaran 2023 dapat diuraikan pada tabel 2.1.

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

Tabel T-C. 2.9. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Kabupaten Muna Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/OUTPUT)	Target Kinerja Capaian	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Kegiatan SKPD Tahun 2022	Realisasi Kegiatan SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d thn berjalan (thn 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		94%	94%	100%	95%	99,92%	105%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP		58	58	100%	65	65	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		-	-	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Keberadaan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah yang tepat waktu		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		25 unit	24 unit	96%	25 unit	25 unit	100%
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	% peningkatan produksi perikanan tangkap		10%	12,63%	126,33%	5%	5%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Penangkapan Ikan yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

**RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2024**

	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		40 orang	40 orang	100%	20 orang	20 orang	100%
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		100%	100%	100%			
13.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	% peningkatan produksi perikanan budidaya		10%	10,98%	109,77%	5%	5%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan		20 orang	20 orang	100%			
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	% Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	% usaha perikanan sesuai aturan/izin		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
15.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	% peningkatan produksi olahan hasil perikanan		5%	14,59%	100%	3%	3%	100%
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dan Jenis Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dan Jenis Fasilitas Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang tersedia		2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%

**RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2024**

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Hasil evaluasi Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muna Barat Tahun 2022 hingga Tahun 2024 disajikan pada tabel T-C.30 berikut :

Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Produksi perikanan Tangkap (ton)			12.506,01	13.445,67	14.329,72	15.046,21	12.805,40	13.647,35	14.329,72	15.046,21	
	Produksi perikanan Budidaya (ton)			15.352,49	16.263,31	17.141,53	17.998,61	15.488,87	16.352,27	17.141,53	17.998,61	
	Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Kecil dan Mikro (ton)			102,57	205,66	143,92	148,23	199,67	139,73	143,92	148,23	
	Konsumsi ikan (kg)			3.788.388	3.794.464	3.851.381	3.794.464	3.557.321	3.684.983	3.758.683	3.833.857	
	bina kelompok nelayan			380	402			53	72			
	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)			9.301,59	11.369,10			3.932,54	3.780,92			
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (ton)			9.301,59	11.369,10			15.000	15.000			
	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial Kawasan			145.687	145.687			1.593,6	2.987,2			

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

lindung perairan (Ha)												
Nilai tukar nelayan							97,62	102,54				

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Secara umum permasalahan yang ada di lingkup kerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat secara garis besar adalah kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Muna Barat (aparatur SKPD, nelayan, pembudidaya ikan dan pengelola hasil perikanan) dan juga keterbatasan sarana prasarana produksi perikanan.

Salah satu modal utama pengembangan bidang kelautan dan perikanan adalah tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, beriman, takwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional dan berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat kerja yang tinggi melalui suatu sistem pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidang kelautan dan perikanan yang terencana untuk mampu memiliki kompetensi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu diperlukan pengembangan SDM, agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM.

Dalam perkembangannya kedepan, SDM harus memiliki standar kapasitas dan kompetensi yang baik untuk meningkatkan kualitas SDM. Hal ini untuk meningkatkan daya saing di tingkat global. Secara internal permasalahan yang terkait dengan kualitas Sumberdaya Manusia di bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Muna Barat (aparatur SKPD, nelayan, pembudidaya ikan dan pengelola hasil perikanan) meliputi :

- Sarana dan prasarana perkantoran masih sangat-sangat terbatas;
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat sangat kurang.
- Tingkat pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan relatif masih rendah;
- Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal.

Dengan segala keterbatasan tersebut maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam artian SDM yang memiliki unsur-unsur pengetahuan, keterampilan, peran sosial, citra diri, perilaku dan motivasi sesuai dengan pekerjaannya dan jenjang jabatannya.

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

Permasalahan lain yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Muna Barat yang meliputi :

- Produktivitas perairan mengalami penurunan akibat degradasi habitat dan ekosistem;
- Produktivitas nelayan hingga saat ini masih rendah;
- Penyediaan sarana dan prasarana produksi yang belum optimal;
- Praktek penangkapan ikan yang *destruktive* yang masih terus berlangsung;
- Konflik pemanfaatan sumberdaya masih sering terjadi;
- Infrastruktur penunjang pada sentra-sentra produksi (jalan, listrik, air bersih, sanitasi) belum optimal;

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan selengkapnya dapat dilihat pada table 2.3. berikut ini.

Tabel 2.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pelayanan Administrasi SKPD	Rendah	Administrasi, sarana dan prasarana kantor	Peningkatan kualitas Pendidikan PNS	Koordinasi lintas sektoral	Terbatasnya sarana dan prasarana kantor
2. Pendidikan nelayan	Rendah	Tingkat pendidikan formal nelayan	Koordinasi lintas sektor dengan dinas pendidikan	Kebijakan pemerintah pusat & Pemda pada sektor pendidikan	Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan kemampuan untuk mengembangkan diri masih terbatas.
3. Aparatur Pengawas Perikanan (PPNS)	Tidak Ada	Rasio luas perairan dengan jumlah pengawas perikanan	Pembinaan pegawai yang disiapkan untuk menjadi PPNS perikanan	Dukungan pelatihan dari Kementerian kelautan dan Perikanan	Aparat Bidang Pengawasan hanya 2 orang serta Sarana Pengawasan yang tidak ada
4. Sumberdaya perairan	Degradasi	Jumlah hasil tangkapan berkurang, Wilayah pengkapan semakin jauh	Pembinaan dan penataan dalam pemanfaatan sumberdaya yang sustainable	Koordinasi lintas sektor, serta dukungan pendanaan pusat dan provinsi	Kualitas sumberdaya perairan semakin terdegradasi.
5. Produktifitas nelayan	Belum optimal	Hasil tangkapan nelayan dan sarana penangkapan	Penyediaan armada perikanan	Dukungan pembiayaan pemprov dan pemerintah pusat Akses Permodalan bagi nelayan Sistem tengkulak yang masih berkembang	produktifitas para nelayan belum optimal
6. Sarana dan prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap dan kegiatan usaha perikanan	Kurang	Ketersediaan sarana dan prasarana budidaya, perikanan tangkap dan keg usaha perikanan	Penyediaan sarana dan prasaran perikanan budidaya, perikanan tangkap dan keg usaha perikanan	Dukungan pembiayaan baik pemprov maupun kementerian kelautan dan perikanan	Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan budidaya dan tangkap serta kurangnya kegiatan usaha perikanan
7. Praktek Penangkapan Ikan Destruktif	Tinggi	Kerusakan Terumbu karang, menurunnya hasil tangkapan	Pengawasan dan pembinaan, mata pencaharian alternatif	Koordinasi lintas sektor, pengawasan bersama	Praktek destruktive fishing masih berlangsung.
8. Konflik Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Tinggi/meningkat	Tingkat konflik dipesisir dan laut	Regulasi pemanfaatan ruang yang kuat	Kerjasama dan dukungan lintas sektor	Konflik dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan masih terjadi
9. Pengawasan, partisipasi masyarakat dan koordinasi	Belum Optimal	Intensitas pengawasan dan tingkat partisipasi	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dan pemberdayaan	Kerjasama lintas sektor	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum optimal, disertai rendahnya

**RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2024**

		masyarakat	masyarakat		partisipasi masyarakat serta masih lemahnya kerjasam lintas sektor
10. Infrastruktur pada sentra – sentra produksi	kurang	Sarana Jalan, listrik, sanitasi dan infrastruktur pendukung lain yang terdapat di sentra-sentra produksi	Penetapan wilayah sentra produksi perikanan berdasarkan potensi masing-masing wilayah	Kerjasama lintas sektor (kimpraswil, Perindag dan Koperasi)	Infrastruktur pada kawasan sentra-sentra produksi masih minim

Berdasarkan tabel 2.2, terlihat bahwa aspek kajian yang terkait dengan sumberdaya manusia masih perlu ditingkatkan. Produktivitas nelayan hingga saat ini masih tergolong rendah, Saprasi produksi dan pemasaran hasil perikanan yang masih terbatas serta belum adanya sapsras pengawasan.

Sumber daya ikan yang berada di perairan pantai cenderung mengalami penurunan populasi (*overfishing*). Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas adalah degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran perairan baik laut maupun tawar, kegiatan perikanan yang merusak (*destructive fishing*), penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebih (*overfishing*) yang dilakukan secara illegal seperti penggunaan metode penangkapan ikan dengan bahan peledak, penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan izin dan yang tidak berizin.

Berdasarkan Isu-isu dan permasalahan yang sudah teridentifikasi maka tantangan dan peluang dalam menjalankan kegiatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Rencana Program Kabupaten Muna Barat adalah :

1. Program Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan) :

a. Permasalahan Pelayanan SKPD :

- Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan kelompok Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan masih rendah.
- Terbatasnya Infrastruktur untuk mendukung kepastian usaha Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana produksi Perikanan budidaya dan Tangkap.
- Teknologi Budidaya dan penangkapan yang diterapkan masih rendah

- Rendahnya kemampuan nelayan dan pembudidaya ikan dalam pengelolaan usaha perikanan yang masih rendah.
 - Penurunan produktivitas perairan.
 - Teknologi budidaya yg diterapkan masih bersifat tradisional
 - Pengolahan dan pemasaran produk belum dikembangkan dengan baik
- b. Tantangan :
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan kelompok
 - Rendahnya kemampuan/kapasitas kelembagaan kelompok bagi masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
 - Terbatasnya permodalan usaha
 - Sarana dan prasarana produksi yang masih kurang
 - Akses informasi bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan masih terbatas.
- c. Peluang :
- Kegiatan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan cukup tinggi
 - Potensi komoditas cukup besar
 - Adanya dukungan kebijakan pemerintah
 - Minat masyarakat yang bermukim di wil. pesisir & pulau-pulau kecil cukup besar dalam melakukan kegiatan bidang perikanan
 - Kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dan pemerintah pusat cukup tinggi
2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dasar usaha perikanan, Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, Program Penguatan Kapasitas Kelompok Usaha masyarakat kelautan dan perikanan dalam pendayagunaan sumberdaya perikanan:
- a. Permasalahan Pelayanan SKPD :
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan usaha budidaya dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
 - SDM masyarakat Kelautan dan Perikanan masih rendah.
 - Akses informasi bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah serta pemasar hasil perikanan masih terbatas.

- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam operasional.
 - Rendahnya penegakan peraturan dalam pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan
- b. Tantangan :
- Aksesibilitas ke daerah pesisir dan pulau-pulau kecil masih sulit
 - Partisipasi masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan yang kurang
 - Tingkat pendidikan masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan masih rendah
 - Sarana dan prasarana infrastruktur yang kurang
 - Kerjasama lintas sektoral
 - Data base yang masih minim
- c. Peluang :
- Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar
 - Komitmen dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat

1. Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Sinergis

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam konteksnya merupakan bidang pembangunan yang sangat kompleks dan banyak memiliki keterkaitan dengan pihak lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelompokan stakeholders dapat di jabarkan sebagai berikut : Pemerintah, swasta dan masyarakat. Gambaran pelaku tersebut mengisyaratkan bahwa setiap upaya dan langkah-langkah pengembangan akan memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak lain.

Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antar pelaku di bidang kelautan dan perikanan dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan program-program pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih terpadu dan terintegrasi menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan. Dinas kelautan dan perikanan membuka peluang keterpaduan pihak swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran. Kondisi keterpaduan antar pihak harus terus di perbaiki, hubungan antar asosiasi profesi perlu terus di tingkatkan demikian pula hubungan pusat dan daerah, serta lembaga ekonomi mikro perlu diberdayakan.

2. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Upaya untuk membangun sektor kelautan dan perikanan kabupaten muna barat saat ini di hadapkan pada suatu dilema, bahwa disatu sisi diharapkan sektor kelautan dan perikanan mampu berperan sebagai sektor unggulan penyumbang PAD di Kabupaten Muna Barat, namun disisi lain tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Keterbatasan anggaran tersebut sebagai konsekuensi menjadi daerah otonom, yang harus mampu membiayai segala kebutuhan daerah, sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten Muna Barat menerapkan skala prioritas untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

Berdasarkan tantangan dan peluang dalam peningkatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam rangka tindak lanjut perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2024 adalah :

1. Bahwa mengingat bentang wilayah Kabupaten Muna Barat yang merupakan wilayah kepulauan dan daratan maka wilayah kerja Dinas Kelautan dan Perikanan hampir mencakup semua wilayah Kabupaten Muna Barat (sekitar 85%), maka diperlukan Program yang langsung dapat bersentuhan dengan usaha bidang kelautan dan perikanan. Dalam rangka pengukuran tingkat kinerja dan capaian Renstra SKPD, maka diperlukan kegiatan “Pemutakhiran Data Base Kelautan dan Perikanan” dengan indikator kinerja yakni adanya dokumen data statisik perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan hasil perikanan dan data kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Data base ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan utama penyusunan perencanaan SKPD.
2. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM *stakeholder* kelautan dan perikanan di Kabupaten Muna Barat, terutama dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan diperlukan kegiatan “Penguatan Kapasitas Usaha Masyarakat Kelautan dan Perikanan, program pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Melalui Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan”. Kegiatan ini sangat diperlukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri, BLH, BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan serta lembaga non-pemerintah sesuai

dengan tupoksinya masing – masing, dalam rangka mempersiapkan kabupaten Muna Barat sebagai kabupaten kepulauan.

3. Dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya, guna mewujudkan target pertumbuhan produksi pada tahun 2024 yakni diperlukan kerja keras dan anggaran yang memadai untuk menstimulus dan mencapai target-target pertumbuhan tersebut.

Untuk mencegah/mengurangi kerusakan lebih lanjut pada ekosistem pesisir pantai serta *overfishing* perairan pantai, maka diperlukan stimulus untuk mendorong nelayan untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat di lihat pada tabel T-C.31.

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Muna Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		2.553.789	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		2.553.851	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP	60	25.275	1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	60	38.810	APBD II/DAU
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	4.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	4.375
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	300		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	300
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	300		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	300
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	300		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	300
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	200		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	200

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	300	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.175		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	33.035	
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	2.292.632	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	2.281.472	APBD II/DAU
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	2.280.347		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah orang penerima gaji dan tunjangan pada tahun berjalan.	25 orang	2.280.347	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	11.160		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi			0	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	225		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi OPD	5 kali	225	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	225		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	6 kali	225	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	225		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase temuan yang ditanggapi	100 %	225	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1 Laporan	225		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen Laporan Keuangan Berkala OPD	7 kali	225	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	225		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah laporan prognosis yang disampaikan tepat waktu	2 dokumen	225	
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Keberadaan Laporan Barang Milik Daerah OPD yang disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	450	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Keberadaan Laporan Barang Milik Daerah OPD yang disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	450	APBD II
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	150		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	150	

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	150		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan barang milik daerah	7 kali	150	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	150		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dokumen laporan barang yang terekonsiliasi	1 dokumen	150	
	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Keberadaan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah yang tepat waktu	1 Laporan	10.000	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Keberadaan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah yang tepat waktu	1 Laporan	10.000	APBD II
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	10.000		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	10.000	
	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian	1 Dokumen	525	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik	1 Dokumen	525	APBD II
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	525		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan persentase pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 kali	525	
	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	508.379	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	400.379	APBD II
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1.999		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1.999	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	48.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	0	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	60.000		Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	16.920		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	16.920	
		Penyediaan Bahan/Material	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	23.000		Penyediaan Bahan/Material	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	23.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	358.460		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	358.460	

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	1 Laporan	122.000	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	1 Laporan	122.000	APBD II
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	114.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	114.000	
	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	25 Unit	29.993	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	25 Unit	89.993	APBD II
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	8.993		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	68.993	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	9.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	9.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% peningkatan produksi perikanan tangkap	5%	620.050	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% peningkatan produksi perikanan tangkap	5%	1.353.000	12 bulan	
	1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan yang Tersedia	1 dokumen	1.105.090		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan yang Tersedia	1 dokumen	15.000	APBD II

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	10.000		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Data dan Informasi Perikanan tangkap	1 dokumen	15.000	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	14 unit	599.000							
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3 Unit	496.090							
	2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.266.533	APBD II
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya	50 orang	2.250.533	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok	16.000	
3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% peningkatan produksi perikanan budidaya	5%	477.603	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% peningkatan produksi perikanan budidaya	5%	670.054		
	1.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dokumen pengelolaan pembudidayaan ikan	1 Dokumen	477.603		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dokumen pengelolaan pembudidayaan ikan	80%	670.054	
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	6.000		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	6.000	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	400.000		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	218.385	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	69.603		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	435.669	
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30 Orang	10.000		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30 Orang	10.000	

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	persentase usaha perikanan yang sesuai aturan	70%	4.000	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	persentase usaha perikanan yang sesuai aturan	70%	4.000	
1.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1 dokumen	4.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1 dokumen	4.000	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	2.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	2.000	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Paket	2.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Paket	2.000	
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% peningkatan produksi olahan hasil perikanan	3%	108.500	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% peningkatan produksi olahan hasil perikanan	3%	116.500	
1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	1 dokumen	7.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	1 dokumen	15.000	DAU
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 dokumen	7.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 dokumen	15.000	

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1 Dokumen	26.500	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1 Dokumen	26.500	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 Unit Usaha	26.500	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 Unit Usaha	26.500	
3.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang bermutu	1 paket	75.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang bermutu	1 paket	75.000	DAU
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 pelaku usaha	75.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 pelaku usaha	75.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam perumusan program dan kegiatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2024 telah mempertimbangkan berbagai macam usulan para pemangku kepentingan dan berdasarkan hasil pengumpulan data dilapangan serta pengamatan saat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan.

Proses perumusan program/kegiatan telah dilakukan berdasarkan data-data yang di himpun melalui observasi dilapangan dan juga langsung melakukan diskusi dengan pelaku usaha perikanan budidaya, tangkap, pemasaran dan pengolahan hasil serta tokoh-tokoh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain rumusan program tersebut juga kami telah mengumpulkan isu-isu yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, terutama soal penurunan produktifitas perairan akibat rusaknya ekosistem penting pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terkait dengan hasil observasi yang dikumpulkan, maka dilakukan penelaahan usulan program/kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat saat melakukan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan yang di fasilitasi oleh BAPPEDA Kabupaten Muna Barat. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya di bahas dan di kaji secara bersama-sama melalui pertemuan dengan seluruh kepala bidang dan staf lingkup dinas kelautan dan perikanan kabupaten muna barat. Dalam pertemuan ini membahas Rencana kerja SKPD tahun 2024 dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang telah di kumpulkan dan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan terkait dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Untuk penyajian tentang penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat di lihat pada tabel T-C.32.

**RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2024**

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Muna Barat.

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pembuatan Tambak	Desa Lemoambo	Luasan tambak yang tercetak	10 Ha	
2	Pengembangan Tambak	Desa Lakawoghe	Luasan tambak yang tercetak	10 Ha	
3	Pengadaan Perahu Nelayan	Desa Maginti	Jumlah Perahu Nelayan yang tersedia	80 Unit	
4	Pengadaan Bubu Rajungan	Desa Bangko	Jumlah Bubu Rajungan yang tersedia	5.000 Unit	
5	Pengadaan Jaring Ikan Dasar	Desa Maginti	Jumlah Jaring Ikan Dasar yang tersedia	150 Pis	
6	Pembuatan Jalan Nelayan	Desa Masara	Panjang jalan usaha yang terbangun	1.500 m	
7	Pengadaan Alat Tangkap Nelayan	Desa Santiri	Jumlah alat tangkap yang tersedia	50 Unit	
8	Pengadaan Mesin/Perahu	Desa Bero	Jumlah mesin/perahu yang tersedia	20 Unit	
9	Pembuatan Tambak Air Tawar	Desa Waulai	Luasan tambak yang tercetak	2 Ha	
10	Pengadaan Jaring Kepiting Rajungan	Gala	Jumlah Jaring rajungan yang tersedia	1 Paket	
11	Pengadaan Jaring Kepiting	Desa Maginti	Jumlah Jaring rajungan yang tersedia	200 Pis	
12	Bantuan Alat Tangkap	Desa Kangkunawe	Jumlah alat tangkap yang tersedia	200 KK	
13	Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar	Wuna	Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia	10.000 Ekor	
14	Pengadaan Bubu Ikan	Desa Maginti	Jumlah bubu ikan yang tersedia	100 Unit	
15	Pengadaan Bubu Kepiting	Desa Maginti	Jumlah bubu kepiting yang tersedia	300 Unit	
16	Pengadaan Bibit Rumput Laut	Desa Kangkunawe	Jumlah bibit rumput laut yang tersedia	100 KK	
17	Pengadaan Alat Pancing Rawai	Desa Waukuni	Jumlah alat pancing rawai yang tersedia	1 Paket	
18	Pengadaan Jaring Ikan Rajungan	Desa Bangko	Jumlah Jaring rajungan yang tersedia	2.000 Pis	
19	Pengadaan Mesin Katinting	Desa Maginti	Jumlah mesin katintin yang tersedia	80 Unit	
20	Pengadaan Perahu Fiber	Desa Kangkunawe	Jumlah perahu fiber yang tersedia	100 KK	
21	Pengadaan Perahu Fiber	Desa Bangko	Jumlah perahu fiber yang tersedia	70 Unit	
22	Bantuan Rumpon	Desa Kangkunawe	Jumlah rumpon yang tersedia	1 Paket	
23	Bantuan Bibit Ikan Air Tawar	Desa Barakkah	Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia	10.000 Ekor	
24	Pengadaan Bibit Ikan Mas	Desa Abadi Jaya	Jumlah bibit Ikan Mas yang tersedia	1 Klp	
25	Saprodi Tambak	Desa Barakkah	Jumlah dan jenis saprodi tambak yang tersedia	174 Ha	
26	Bantuan Benih Udang	Desa Barakkah	Jumlah benur udang yang tersedia	174 Ha	
27	Bantuan Bibit Ikan Air Tawar	Desa Barakkah	Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia	174 Ha	
28	Bantuan Mesin Katinting	Desa Bangko	Jumlah mesin katintin yang tersedia	30 Unit	
29	Pengadaan Sero	Desa Maginti	Jumlah sero yang tersedia	2 Unit	

**RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2024**

30	Alat Tangkap Nelayan/Pukat, Bagang dan Bubu Rajungan	Desa Bero	Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia	50 Unit	
31	Pengadaan Mesin/Perahu	Desa Tiga	Jumlah mesin perahu yang tersedai	20 Unit	
32	Pengadaan Bibit Rumput Laut	Desa Maginti	Jumlah bibit rumput laut yang tersedia	500 kg	
33	Pengadaan Mesin/Perahu	Desa Santigi	Jumlah mesin perahu yang tersedai	20 Unit	
34	Tangkap Nelayan/Pukat, Bagang dan Bubu Rajungan	Desa Tiga	Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia	50 Unit	
35	Pengadaan Mesin/Perahu	Desa Santiri	Jumlah mesin perahu yang tersedai	20 Unit	
36	Pengadaan Mesin/Perahu	Desa Tasipi	Jumlah mesin perahu yang tersedai	20 Unit	
37	Pengadaan Mesin/Perahu	Desa Mandike	Jumlah mesin perahu yang tersedai	20 Unit	
38	Tangkap Nelayan/Pukat, Bagang dan Bubu Rajungan	Desa Santigi	Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia	50 Unit	
39	Tangkap Nelayan/Pukat, Bagang dan Bubu Rajungan	Desa Tasipi	Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia	50 Unit	
40	Tangkap Nelayan/Pukat, Bagang dan Bubu Rajungan	Desa Mandike	Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia	50 Unit	
41	Bantuan Sero	Desa Latawe	Jumlah sero yang tersedia	10 Unit	
42	Bibit Ikan Air Tawar (Nila)	Desa Katangana	Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia	1.000 Ekor	
43	Pengadaan Mesin/Perahu		Jumlah mesin perahu yang tersedai	20 Unit	
44	Bantuan Perahu Fiber 1 GT + Peralatan Nelayan	Desa Latawe	Jumlah Perahu Fiber 1 GT + Peralatan Nelayan yang tersedia	10 unit	
45	Alat Tangkap Nelayan/Bubu Rajungan	Desa Tondasi	Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia	1.000 Buah	
46	Bantuan Bibit Ikan Air Tawar	Desa Sangia Tiworo	Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia	6 Klp	
47	Pembuatan Kolam Air Tawar	Desa Kasimpa Jaya	Luas kolam air tawar yang tercetak	2 Ha	
48	Bantuan Bibit Ikan Air Tawar	Desa Kasimpa Jaya	Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia	10.000 Ekor	

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2024

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Keterkaitan Kebijakan Prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta Program dan Kegiatan pada SKPD Dinas Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Kebijakan				Ket
	Program dan kegiatan OPD	Kabupaten	Provinsi	Nasional	
				Peningkatan Produksi pangan	

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menjabarkan melalui Misinya yaitu : “ Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan.” Terkait dengan kebijakan tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Untuk mewujudkan RKP tersebut maka kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

2. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak harus berdasarkan Money follow fonction, tetapi Money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata.
3. Nomenklatur kegiatan harus sejalan dengan visi dan misi pembangunan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan kewenangannya.

Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dengan cara pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaulat, mandiri dan berkelanjutan yaitu meningkatkan dan menyediakan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, pemasaran, pengawasan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan serta konservasi.

Tujuan dalam RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 yaitu pada Tujuan 3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Sasaran 3.1 Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan.

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas Usaha Perikanan, Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perikanan, Peningkatan Kualitas dan Keamanan Produk Perikanan, Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Ikan, serta Pengelolaan SDKP secara Berkelanjutan. Tekait dengan kebijakan tersebut di atas maka pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam menjalankan pembangunan mengacu pada tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan RPD Kabupaten Muna Barat 2023-2026, yakni:

1. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
2. Memantapkan infrastruktur dan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
3. Memperkuat ekonomi yang berkualitas dan berkedilan;
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan.

Sejalan dengan telaah beberapa kebijakan visi dan misi KKP RI, DKP Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Muna Barat, maka mengacu pada potensi wilayah Kabupaten Muna Barat, dinas kelautan dan perikanan sebagai dinas teknis yang berkepentingan membangun kabupaten Muna Barat di bidang kelautan dan perikanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, akan di implementasikan melalui

tujuan “Memperkuat ekonomi yang berkualitas dan berkedilan”. Untuk itu sasaran yang akan dituju sesuai dengan RPD Kabupaten Muna Barat adalah “Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi kerakyatan berbasis komoditi minapolitan dan agropolitan”.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan tujuan yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu empat tahun (2023 – 2026). Berikut tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2023 – 2026 yaitu :

1. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi kerakyatan berbasis komoditi minapolitan dengan sasaran adalah : Meningkatkan Produksi Perikanan;
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, dengan sasarannya adalah : Meningkatkan akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat akan melaksanakan serangkaian program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana termuat dalam Lampiran 1. Rumusan program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan tersebut, telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan
- b. Pengentasan Kemiskinan
- c. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah
- d. Mengurangi Laju Degradasi Lingkungan Pesisir
- e. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan tersebut disajikan sebagaimana Tabel T – C.33. berikut :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Muna Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				9.258.447.808				10.166.692.589
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			3.204.222.083				3.522.444.291
3 25 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP			22.660.000				24.926.000
3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Muna Barat	1 dok	4.800.000	DAU		1 dok	5.280.000
3 25 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Muna Barat	1 Laporan	17.860.000	DAU		12 kali	19.646.000
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu		1 Laporan	2.552.061.086			1 Laporan	2.807.267.195
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Muna Barat	24 orang/bulan	2.551.611.086	DAU		24 orang	2.806.772.195
3 25 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Muna Barat	1 Laporan	225.000	DAU		5 kali	247.500
3 25 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Muna Barat	1 Laporan	225.000	DAU		5 kali	247.500
3 25 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keberadaan Laporan Barang Milik Daerah OPD yang disampaikan tepat waktu			450.000				495.000
3 25 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Muna Barat	1 laporan	150.000	DAU		2 kali	165.000
3 25 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Muna Barat	1 laporan	150.000	DAU		2 kali	165.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 25 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Muna Barat	1 laporan	150.000	DAU		1 dok	165.000
3 25 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Keberadaan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah yang tepat waktu		1 Laporan	10.000.000			1 Laporan	11.000.000
3 25 01 2.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Muna Barat	1 Laporan	10.000.000	DAU		90 %	11.000.000
3 25 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian		1 Dok	525.000			1 Dok	577.500
3 25 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Muna Barat	1 Dok	525.000	DAU		5 kali	577.500
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Dokumen	415.533.000			1 Dokumen	457.086.300
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Muna Barat	1 paket	1.999.000	DAU		1 paket	2.198.900
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Muna Barat	1 dok	16.920.000	DAU		12 eks	18.612.000
3 25 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Muna Barat	1 paket	23.000.000	DAU		1 paket	25.300.000
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Muna Barat	50 Laporan	373.614.000	DAU		50 kali	410.975.400
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah		1 laporan	121.999.997			1 Laporan	134.199.997
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Muna Barat	1 laporan	7.999.997	DAU		1 paket	8.799.997
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Muna Barat	1 laporan	114.000.000	DAU		100 %	125.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		25 unit	80.993.000			25 unit	11.000.000
3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Muna Barat	18 unit	68.993.000			1 paket	75.892.300
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Muna Barat	5 unit	5.000.000	DAU		1 paket	5.500.000
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Muna Barat	1 unit	5.000.000	DAU		1 paket	5.500.000
3 25 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Muna Barat	1 unit	2.000.000	DAU		1 paket	2.200.000
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	% peningkatan produksi perikanan tangkap		5 %	3.950.297.518			5 %	4.327.727.270
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan yang Tersedia			64.950.000				71.445.000
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 dok	64.950.000	DAU		1 dok	71.445.000
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	3.885.347.518			1 Dokumen	4.256.282.270
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya		50 orang	3.869.347.518	DAU		60 orang	4.256.282.270
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya		2 kelompok	16.000.000	DAU			
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	% peningkatan produksi perikanan budidaya			1.705.928.207				1.876.521.028
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen pengelolaan pembudidayaan ikan		1 dokumen	1.705.928.207			1 dokumen	1.876.521.028

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 dok	6.000.000	DAU		1 dok	6.600.000
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 unit	418.484.700	DAU		4 unit	460.333.170
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		6 unit	1.271.443.507	DAU		7 unit	1.398.587.858
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		30 orang	10.000.000	DAU		30 orang	11.000.000
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	persentase usaha perikanan yang sesuai aturan		100 %	4.000.000			100 %	4.400.000
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		1 Dokumen	4.000.000			1 Dokumen	4.400.000
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		1 Dokumen	2.000.000	DAU		1 Dokumen	2.200.000
3 25 05 2.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		1 Dokumen	2.000.000	DAU		1 Dokumen	2.200.000
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	% peningkatan produksi olahan hasil perikanan		3 %	394.000.000			3 %	433.400.000
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil		1 dok	15.000.000			1 dok	16.500.000
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko		1 dok	15.000.000	DAU		1 dok	16.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			26.500.000				29.150.000
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		3 unit usaha	26.500.000	DAU		3 unit usaha	29.150.000
3 25 06 2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang bermutu			352.500.000				387.750.000
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		3 pelaku usaha	352.500.000	DAU		2 pelaku usaha	387.750.000

Tabel T – C.33.di atas memperlihatkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan berpedoman pada 5 Program utama yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan, dan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Dalam menunjang program dan kegiatan tersebut, memerlukan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 9.258.447.808 ,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) yang keseluruhannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Penutup

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024, merupakan dokumen yang disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat yang disinkronkan dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Pusat.

Renja ini diharapkan bisa menjadi acuan yang konsisten untuk dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya yaitu RKA dan DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024. Hal ini penting untuk mengimplentasikan konsep perencanaan yang *bottom up*, yang dapat mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Muna Barat, namun tetap berpegang pada rambu-rambu kebijakan yang telah ditetapkan.

Bila nanti dalam pelaksanaanya, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka akan dilakukan :

- Pengurangan volume kegiatan
- Kegiatan yang kurang anggarannya dan belum terlalu prioritas akan dialihkan pada kegiatan lain yang juga kurang anggarannya namun sangat dibutuhkan pada tahun berjalan
- Selanjutnya bila memungkinkan kami bermohon untuk mendapatkan tambahan alokasi anggaran, sehingga kegiatan prioritas yang di usulkan oleh masyarakat dapat dialokasikan sesuai dengan persyaratan teknis kegiatan.

**RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2024**

Akhirnya dengan dukungan seluruh *stakeholder* dalam pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan dapat mendorong tercapainya Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat.

Laworo, April 2023

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Muna Barat



Ir. H. LA DJONO

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP.19631231 199203 1 119